

## BPK Bentuk Tim Khusus Audit Pengelolaan Aset

Borneo Tribune, Pontianak  
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Rizal Djalil menyatakan, akan membentuk tim khusus untuk melakukan audit terhadap pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan kabupaten/kota daerah itu.

"Kami memberi perhatian serius terhadap pengelolaan aset milik Pemprov Kalbar, kabupaten/kota di provinsi ini," katanya usai melantik pejabat baru BPK RI Perwakilan Kalbar dari Mudjijono kepada pejabat baru Adi Sudibyo di Pontianak, Senin.

Ia menjelaskan, dibentuknya tim khusus tersebut karena dalam laporan keuangan milik Pemprov Kalbar dan kabupaten/kota rata-rata bermasalah dalam hal pengelolaan aset.

"Tolong permasalahan pengelolaan aset segera disele-

saikan agar ketika diaudit tidak lagi dinilai wajar dengan pengecualian (DWP)," kata Rizal.

Ia meminta, Pemprov Kalbar menganggarkan dalam APBD, untuk pembentukan tim khusus tersebut, karena anggotanya dari pihak BPK dan dari perwakilan pemerintah daerah itu sendiri.

BPK RI Perwakilan Kalbar pada semester satu 2010 masih menemukan 2.089 laporan keuangan daerah yang tidak tepat senilai Rp31,98 triliun. Banyaknya temuan dalam pengelolaan laporan keuangan daerah tersebut karena masih belum dikelola dengan baik. "Kami melihat beberapa entitas pemerintah daerah `bermain-main` dalam pelaksanaan belanja daerah," kata Rizal.

Ia menjelaskan, beberapa kasus dari temuan tersebut sudah diungkap dan disampaikan kepada aparat hu-

kum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari catatan BPK RI Perwakilan Kalbar, sebanyak 2.089 temuan dengan nilai Rp31,98 triliun, 4.136 rekomendasi senilai Rp3,21 triliun. Dari rekomendasi tersebut sebanyak 1.545 rekomendasi senilai Rp436,99 miliar telah ditindaklanjuti.

Kemudian tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi BPK sebanyak 1.090 rekomendasi senilai Rp1,44 triliun. "Masih sebanyak 1.051 rekomendasi senilai Rp1,33 triliun telah kami minta kepada seluruh ketua DPRD agar segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada," kata Rizal.

Dalam kesempatan itu, Rizal juga meminta gubernur Kalbar, bupati/wali kota segera melakukan langkah-langkah strategis terhadap rekomendasi BPK. (ANTARA) □